

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022
DIPA 005.01.401199

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998

e-mail : admin@pa-yogyakarta.net



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998

DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

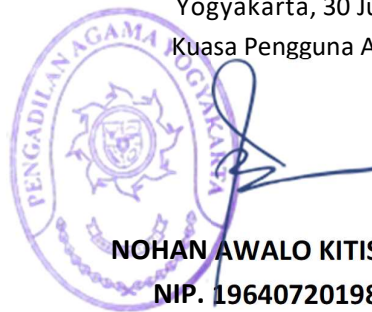
Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



NOHAN AWALO KITISWORO, S.H.

NIP. 196407201987032002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.3. Basis Akuntansi	15
A.4. Dasar Pengukuran.....	15
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja Negara	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar.....	29
C.2. Aset Tetap	32
C.3. Pendapatan Diterima Dimuka	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	38
D.2. Beban Pegawai	38
D.3. Beban Persediaan	39
D.4. Beban Barang dan Jasa	39
D.5. Beban Pemeliharaan	40
D.6. Beban Perjalanan Dinas	40
D.7. Beban Barang Diserahkan Masyarakat	41
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	41

D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	42
D.11.	Beban Lain-lain	42
D.12.	Kegiatan Non Operasional	42
D.13.	Pos Luar Biasa	43
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1.	Ekuitas Awal	44
E.2.	Surplus (defisit) LO	44
E.3.	Koreksi-koreksi	44
E.4.	Transaksi Antar Entitas	45
E.5.	Ekuitas Akhir	46
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	47
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	47
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	47
	Laporan-laporan Pendukung	49
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	
	Daftar Rekening Kementerian/Lembaga 2022	
	Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga 2022	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Yogyakarta

Jln. Ipda Tut Harsono No 53 Yogyakarta DI. Yogyakarta - DI Yogyakarta

Telp. 0274-552997 Fax. 0274-552998 e-mail : admin@pa-yogyakarta.net

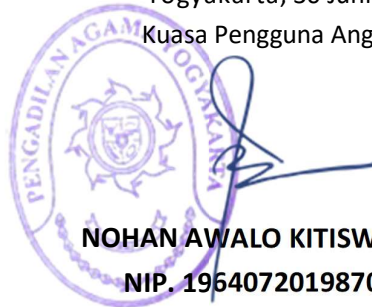
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



NOHAN AWALO KITISWORO, S.H.

NIP. 196407201987032002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.484.904 atau mencapai 31,31 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 4.743.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.833.487.580 atau mencapai 51,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.446.856.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	4.743.000	1.484.904	31,31	1.484.904
Belanja Negara	9.446.856.000	4.833.487.228	51,17	5.170.480.466

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 49.282.095.810, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 26.021.934; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp. 49.256.073.876; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.178.824.968 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 1.178.824.968 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0. Dan nilai ekuitas disajikan sebesar Rp. 48.103.270.842.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	26.021.934	4.130.300	21.891.634	530
Aset Tetap	49.256.073.876	49.155.073.876	101.000.000	0,21
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	49.282.095.810	49.159.204.176	122.891.634	0,25
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.178.824.968	14.720.719	1.164.104.249	7.908
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	1.178.824.968	14.720.719	1.164.104.249	7.908
Ekuitas				
Ekuitas	48.103.270.842	49.144.483.457	(1.041.212.615)	(2,17)
Jumlah Ekuitas	48.103.270.842	49.144.483.457	(1.041.212.615)	(2,17)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	49.282.095.810	49.159.204.176	122.891.634	0,25

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.732.388, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.874.947.327, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 5.873.214.939). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami defisit - LO sebesar (Rp. 5.873.214.939).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 49.144.483.457 ditambah defisit - LO sebesar (Rp. 5.873.214.939) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.832.002.324, sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 48.103.270.842.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	4.743.000	1.484.904	0	2.969.808
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			4.743.000	1.484.904	0	2.969.808
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	8.007.162.000	4.028.011.358	50,31	4.367.437.386
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.335.194.000	704.475.870	52,76	530.436.965
3.	Belanja Modal	B.2.3.	104.500.000	101.000.000	96,65	272.606.115
Jumlah Belanja Negara			9.446.856.000	4.833.487.228	51,17	5.170.480.466

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NERACA

PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Des 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	19.403.750	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	247.484	0
Persediaan	C.1. 3.	6.370.700	4.130.300
Jumlah Aset Lancar		26.021.934	4.130.300
Aset Tetap	C.2.		
Tanah	C.2. 1.	43.029.069.000	43.029.069.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.842.432.931	3.741.432.931
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.572.081.000	5.572.081.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2. 4.	738.396.000	738.396.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	27.668.479	27.668.479
Akumulasi Penyusutan	C.2. 6.	(3.953.573.534)	(3.953.573.534)
Jumlah Aset Tetap		49.256.073.876	49.155.073.876
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	38.080.000	38.080.000
Aset Lan-lain	C.3. 2.	98.000	98.000
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(38.178.000)	(38.178.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		49.282.095.810	49.159.204.176
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	1.143.421.218	14.720.719

Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	16.000.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	19.403.750	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.178.824.968	14.720.719
Jumlah Kewajiban		1.178.824.968	14.720.719
EKUITAS			
Ekuitas	C.5. 1	48.103.270.842	49.144.483.457
Jumlah Ekuitas		48.103.270.842	49.144.483.457
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		49.282.095.810	49.159.204.176

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	1.732.388	0
Jumlah Pendapatan		1.732.388	1.484.904
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	5.142.546.576	4.355.658.554
Beban Persediaan	D. 3	6.811.500	5.558.880
Beban Barang dan Jasa	D. 4	470.500.659	397.903.806
Beban Pemeliharaan	D. 5	249.088.592	114.388.593
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	6.000.000	1.950.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	221.784.601
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5.874.947.327	5.097.244.434
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.873.214.939)	(5.095.759.530)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	3
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	3

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNBP	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(5.873.214.939)	(5.095.759.527)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	49.144.483.457	49.648.394.374
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.095.788.627)	(3.349.007.717)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah / mengurangi Ekuitas	E. 3	0	
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0	
Koreksi Nilai Persediaan	E. 5	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 6	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 7	0	0
Lain-lain	E. 8	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 9	5.168.995.559	3.172.058.575
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E. 10	5.170.480.466	3.173.543.479
Diterima Dari Entitas Lain	E. 11	(1.484.907)	(1.484.904)
Transfer Masuk	E. 12	0	0
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 13	73.206.932	(176.949.142)
Ekuitas Akhir		49.330.564.435	49.471.445.232

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Yogyakarta

Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

Misi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional;
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel;
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi
2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat miskin / terpinggirkan
4. Peningkatan tertib administrasi perkara
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Badan Peradilan Agama Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Agama Yogyakarta.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Negara yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan diakui setelah jasa telah selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2021 dan 2021. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
1.484.904*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.484.904 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	1.484.904
2.	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan		0	1.484.904

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 hampir tidak terdapat kenaikan/penurunan dikarenakan sumber pendapatan masih sama dengan tahun lalu.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.484.904	1.484.907	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3	(3)	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		1.484.904	1.484.907	(3)	0
Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		0	0	0	0
Total Pendapatan Bersih		1.484.904	1.484.907	(3)	0

B.2. Belanja Negara

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.4.833.487
.228

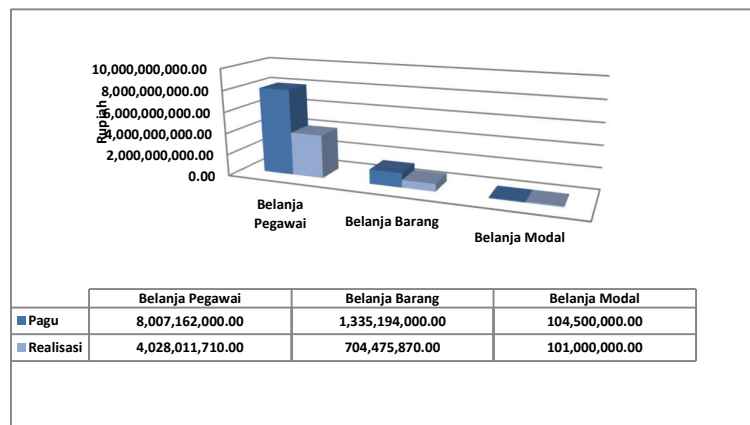
Realisasi Belanja Negara pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.833.487.228 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 51,17 % dari anggaran senilai Rp. 9.446.856.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.007.162.000	4.028.011.358	50.31
Belanja Barang	1.335.194.000	704.475.870	52.76
Belanja Modal	104.500.000	101.000.000	96.65
Total Belanja Bruto	9.446.856.000	4.833.487.228	51.17
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	9.446.856.000	4.833.487.228	27,50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber : Monsakti 2022 dan 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (Rp. 336.993.238) atau sebesar (6,52) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan pembayaran gaji di periode yang sama di tahun lalu lebih besar karena jumlah aparatur lebih banyak daripada periode ini. Selain itu, anggaran belanja modal pada 2021 juga mendapat porsi lebih banyak dari pada tahun ini.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.028.011.358	4.367.437.386	(339.426.028)	(7,77)
Belanja Barang	704.475.870	530.436.965	174.038.905	(32,81)
Belanja Modal	101.000.000	272.606.115	(171.606.115)	(62,95)
Total Belanja	4.833.487.228	5.170.480.466	(336.993.238)	(6,52)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.
4.028.011.358*

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.028.011.358 dan Rp. 4.367.437.386. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan penurunan (Rp. 339.426.028) atau (7,77) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan karena

1. Jumlah aparatur lebih banyak dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama
2. Adanya kenaikan realisasi uang makan

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.335.331.040	1.429.766.520	(94.435.480)	(6,60)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.652	18.239	(1.587)	(8,70)
Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS	79.531.062	85.411.042	(5.879.980)	(6,88)
Belanja Tunjangan Anak PNS	24.384.068	28.486.820	(4.102.752)	(14,40)

Belanja Tunjangan Struktural PNS	20.160.000	23.040.000	(2.880.000)	(12,50)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.066.045.000	2.238.920.000	(172.875.000)	(7,72)
Belanja Tunjangan PPh PNS	282.654.808	342.470.079	(59.815.271)	(17,47)
Belanja Tunjangan Beras PNS	56.053.080	62.208.780	(6.155.700)	(9,90)
Belanja Uang Makan PNS	155.576.000	147.531.000	8.045.000	5,45
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.260.000	9.955.000	(1.695.000)	(17,03)
Belanja Uang Lembur	0	0	0	
Total Belanja Brutto	4.028.011.710	4.367.807.480	(339.795.770)	(7,78)
Pengembalian Belanja	256	370.094	(369.838)	(99,93)
Total Belanja Netto	4.028.011.454	4.367.437.386	(339.425.932)	(7,77)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
704.475.870*

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 704.475.870 dan Rp. 530.436.965.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 174.038.905 atau 32,81 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021.

Hal ini disebabkan karena :

1. Penambahan Pagu Anggaran pemeliharaan Gedung di TA 2022.
2. Program percepatan kinerja, sehingga dapat terserap lebih banyak di semester ini disbanding periode yang sama tahun lalu.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	296.447.550	265.615.825	30.831.905	11,61
Belanja Barang Non Operasional	0	7.250.000	(7.250.000)	(100)
Belanja Barang Persediaan	9.051.900	11.727.800	(2.675.900)	(22,82)
Belanja Jasa	143.887.828	132.916.747	10.971.081	8,25
Belanja Pemeliharaan	249.088.592	110.976.593	138.111.999	124,45
Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000	1.950.000	4.050.000	207,69
Total Belanja Brutto	704.475.870	530.436.965	174.038.905	32,81
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00

Total Belanja Netto	704.475.870	530.436.965	174.038.905	32,81
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal : Rp.
101.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 101.000.000 dan Rp. 272.606.115. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 247.705635 atau 994,78 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan karena bertambahnya alokasi pagu anggaran belanja modal pada DIPA TA 2022.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	101.000.000	242.767.115	(141.767.115)	(58,40)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	29.839.000	(29.839.000)	(100)
Total Belanja Brutto	101.000.000	272.606.115	(171.606.115)	(62,95)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	101.000.000	272.606.115	(171.606.115)	(62,95)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp.
26.021.934*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.021.934 dan Rp. 4.130.300.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	19.403.750	0
Piutang Bukan Pajak	247.484	
Persediaan	6.370.700	4.130.300
Total Aset Lancar	26.021.934	4.130.300

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.
19.403.750*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.403.750 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian Satker	Jenis	30 Juni TA 2022	31 Desember TA 2021
1.	PA Yogyakarta	Kas di Bendahara Pengeluaran	19.403.750	0
Jumlah Total			19.403.750	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank (tidak mempunyai rekening di bank)	0	0
Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp.
6.370.700*

Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.370.700 dan Rp. 4.130.300. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021

No.	Uraian Satker	Jenis	30 Juni TA 2022	TA 2021
1.	PA Yogyakarta	Persediaan	6.370.700	4.130.300
Jumlah Total			6.370.700	4.130.300

No.	Uraian	30 Juni 2022	2021
1	Barang Konsumsi	3.026.700	3.606.300
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	3.344.000	524.000
4	Suku Cadang	0	0

5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		6.370.700	4.130.300

C.1.4. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara.

C.1.5. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.
49.256.073.876

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan TA 2021 tersaji sebesar Rp. 49.256.073.876 dan Rp. 49.155.073.876. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	43.029.069.000	43.029.069.000	0
2	Peralatan dan Mesin	3.842.432.931	3.741.432.931	101.000.000
3	Gedung dan Bangunan	5.572.081.000	5.572.081.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	738.396.000	738.396.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	27.668.479	27.668.479	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	53.209.647.410	53.108.290.201	101.000.000
	Akumulasi Penyusutan	(3.953.573.534)	(3.953.573.534)	0
	Nilai Buku Aset Tetap	49.256.073.876	49.154.716.667	101.000.000

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
43.029.069.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.029.069.000 dan Rp. 43.029.069.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan
1.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.1)	150 M2	13.05.13.04.00818	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas
2.	Tanah Bangunan Rumah Dinas (KIB.2)	775 M2	13.05.13.05.01204	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas
3.	Tanah Bangunan Gedung Kantor (KIB. 1)	1.860 M2	13.05.13.02.01077	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor
4.	Tanah Bangunan	1.800 M2	13.05.13.02.01076	Pemerintah	Gedung Kantor

Gedung Kantor (KIB.2)	Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI
Jumlah	

Mutasi aset tetap berupa Tanah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	43.029.069.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Selisih revaluasi aset	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2022	43.029.069.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku per 30 Juni 2022	43.029.069.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
3.842.432.931

Saldo perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.842.432.931 dan Rp. 3.741.432.931.

Mutasi aset tetap berupa peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	3.741.432.931
Mutasi Tambah :	
Pembelian	101.000.000
Selisih revaluasi aset	
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2022	3.842.432.931
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	3.286.380.209
Nilai Buku per 30 Juni 2022	612.283.922

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
5.572.081.000*

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan TA 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.572.081.000 dan Rp. 5.572.081.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	5.572.081.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Selisih revaluasi aset	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Mutasi Kurang :	0
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni 2022	5.572.081.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	633.634.918
Nilai Buku per 30 Juni 2022	4.938.446.082

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
738.396.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 738.396.000 dan Rp. 738.396.000. Tidak terdapat mutasi pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	738.396.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Selisih revaluasi aset	0
Hibah	0
Reklasifikasi	0
Mutasi Kurang :	0
Penghapusan	0

Saldo per 30 Juni 2022	738.396.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	89.789.607
Nilai Buku per 30 Juni 2022	648.606.393

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp.
27.668.479

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 27.668.479 dan Rp. 27.668.479. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi
dalam
Pengerjaan :
Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp.
(3.953.573.534)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing (Rp. 3.953.573.534) dan (Rp. 3.953.573.534).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.989.664.131	3.286.380.209	612.283.922
2	Gedung dan Bangunan	5.572.081.000	633.634.918	4.938.446.082
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	738.396.000	89.789.607	648.606.393
4	Aset Tetap Lainnya	27.668.479	0	27.668.479
	Akumulasi Penyusutan	10.236.809.610	4.009.804.734	6.227.004.876

C.2.8. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud Rp.
38.080.000*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah Rp 38.080.000 dan Rp 38.080.000.

C.2.9 . Aset Lain-Lain

*Aset Lain-lain
Rp 98.000*

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah Rp 98.000 dan Rp 98.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.2.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp
38.178.000)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing (Rp. 38.178.000) dan (Rp. 38.178.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.2.11. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 19.403.750*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.403.750 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.2.12. Utang kepada Pihak ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
1.143.421.218*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 1.143.421.218 dan Rp 14.720.719. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.2.13. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp.
16.000.000

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp 0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.3.1. Beban yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang
masih harus
dibayar Rp. 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2021 dan TA 2019 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.3.2. Ekuitas

Ekuitas
Rp.
48.103.270.842

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.103.270.842 dan Rp. 49.144.483.457. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.3.3. Kewajiban

Kewajiban :
Rp.
1.178.824.968

Nilai Kewajiban per 30 Juni 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.178.824.968 dan Rp. 14.720.719. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 30 Juni TA 2022 tercatat sebesar Rp. 1.178.824.968.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Pengadilan Agama Yogyakarta per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Uang Muka dari KPPN	19.403.750	0

Utang Yang Belum Ditagihkan	16.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.143.421.218	14.720.719
Jumlah	1.178.824.968	14.720.719

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
1.732.388*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.732.388 dan Rp. 1.484.904. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	1.732.388
3.	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan		0	1.732.388

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
5.142.546.576*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.142.546.576 dan Rp. 4.355.658.554. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Gaji	1.713.621.460	1.428.348.220	285.273.240	19,97
Beban Tunjangan-tunjangan	3.428.925.116	2.927.310.334	501.614.782	17,14
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	5.142.546.576	4.355.658.554	786.888.022	18,07

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 6.811.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.811.500 dan Rp. 5.558.880. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	6.811.500	5.558.880	1.252.620	22,53
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	6.811.500	5.558.880	1.252.620	22.53

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
470.500.659*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 470.500.659 dan Rp. 397.903.806. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	470.500.659	397.903.806	72.596.853	18,24
Total Beban Jasa	470.500.659	397.903.806	72.596.853	18,24

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.
249.088.592

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 249.088.592 dan Rp. 114.388.593. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.871.133	46.019.937	122.851.196	266,96
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.120.294	0	5.120.294	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.097.165	64.956.656	10.140.509	15,61
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	3.412.000	(3.412.000)	(100)
Total Beban Pemeliharaan	249.088.592	114.388.593	134.699.999	121,38

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
6.000.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.000.000 dan Rp. 1.950.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	6.000.000	1.950.000	4.050.000	207,69
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	6.000.000	1.950.000	4.050.000	207,69
------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp. xxx*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. xxx dan Rp. 211.570.828. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	140.897.139	xx	xx
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	70.910.839	xx	xx
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	9.976.623	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	xxx	221.784.601	xx	xx

Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	221.784.601	Xx	xx

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 3

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2022 dan 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	2021	Naik (Turun)	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	3	(3)	(100,00)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari Kegiatan	0	3	(3)	(100)

Non Operasional

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.
49.144.483.4
57* Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.144.483.457 dan Rp. 49.257.357.503.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus LO
Rp
(5.873.214.9
39)* Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 5.873.214.939) dan (Rp. 5.095.788.627). Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp
0* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp 0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp
0.* Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp 0.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp 4.832.002.324

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.832.002.324 dan Rp. 5.168.995.559. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.484.904)
Ditagikan ke Entitas Lain	4.833.487.228
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	4.832.002.324

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar (Rp. 1.484.904) sedangkan DKEL sebesar Rp 4.833.487.228.

E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp 0.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.
48.103.270.8
42

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.103.270.842 dan Rp. 49.330.593.535.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK pada tahun 2021 dan 2022.

F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

Terdapat informasi belanja akrual di semester I tahun 2022.

F.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

BRI Cabang Yogyakarta Katamso A/C 0245-01-000650-30-4 a.n. BPG 030 Satker Pengadilan Agama Yogyakarta QQ 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 0,-.

F.5. Revisi DIPA

Terdapat 2 kali revisi selama Semester I Tahun 2022 diantaranya :

1. Revisi 1, tanggal 7 Februari 2022
2. Revisi 2, tanggal 13 April 2022

F.6. Ralat SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Tidak terdapat ralat SPM dan SP2D di tahun 2022

F.7. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran : Nohan Awalo Kitisworo, SH.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : W12.A1/ /KU.01/I/2022 tanggal 1 Januari 2022 menunjuk :

Pejabat Pembuat Komitmen	: Priyo Purnomo, S.Kom.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Destora Dwi Marsudi, SE, SH, MH.
Bendahara Pengeluaran	: Rita Listiyanti, SE.
Bendahara Penerimaan	: Noor Lynda Arnia Sari, S.Sos.

LAPORAN PENDUKUNG